



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALBERTUS YUDHA POERWADI
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 57245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/36 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
8. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
9. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
10. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
11. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	225.000.000
1. MOBIL, MERC BENZ C 200 AT (W205) CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	121.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	129.889.569
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.396.389.569
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.396.389.569

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.